



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PERLOMBAAN KINERJA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan di Kabupaten Sukabumi diperlukan evaluasi perkembangan kelurahan melalui penilaian perlombaan kinerja kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Yang Di Wilayahnya Terdapat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PERLOMBAAN KINERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sukabumi
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
4. Kelurahan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lurah adalah kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
6. Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kelurahan.
7. Instrumen Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
8. Tingkat perkembangan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah kelurahan
9. Tim Penilai Kinerja Kelurahan adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan kelurahan berdasarkan indikator penilaian kinerja kelurahan
10. Lomba kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kelurahan Tingkat Kabupaten Sukabumi.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua...

.Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Maksud

Pasal 2

Maksud Penyusunan Pedoman Penilaian Perlombaaan Kinerja Kelurahan adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan Penilaian Perlombaaan Kinerja Kelurahan.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan Pedoman Penilaian Perlombaaan Kinerja Kelurahan yaitu untuk menentukan status tertentu penilaian tingkat perkembangan Kelurahan.

Bagian ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Penilaian Perlombaaan Kinerja Kelurahan Tingkat Kabupaten Sukabumi meliputi seluruh Evaluasi perkembangan kelurahan yang meliputi evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

Bagian keempat

Asas

Pasal 5

Penyelenggaraan Penilaian Perlombaaan Kinerja Kelurahan dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. transparansi, yaitu dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kelurahan untuk mengembangkan formulasi penilaian;
- b. akuntabilitas, yaitu berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. partisipatif, yaitu tumbuhnya keterlibatan stakeholder pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas kinerja kelurahan;
- d. sinergitas, yaitu diselenggarakan secara terpadu antara Kelurahan yang didukung oleh unit kerja organisasi tingkat Kelurahan;

- e. inovatif, yaitu tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kelurahan dalam mengimplementasikan ide-ide baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. kreativitas, yaitu pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh kelurahan melalui pengelolaan sumber daya organisasi yang ada.

BAB II
PERSIAPAN PENILAIAN LOMBA
Bagian kesatu
Pembentukan Tim Penilai

Pasal 6

Untuk melaksanakan Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan dibentuk Tim Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Tim Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. Bupati selaku pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua;
 - d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris; dan
 - e. unsur Perangkat Daerah terkait selaku Anggota.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua
Tugas Tim Penilai

Pasal 8

Tim Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan Tingkat Kabupaten memiliki tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Tim;
- b. melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan/atau bimbingan teknik;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap indikator penilaian perlombaan kinerja kelurahan; dan
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan.

BAB III
PENILAIAN PERLOMBAAN KINERJA KELURAHAN
Bagian kesatu
Indikator Penilaian

Pasal 9

- (1) Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan menggunakan indikator penilaian.
- (2) Indikator Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat kelurahan.
- (3) Indikator penilaian perlombaan kinerja kelurahan terdiri meliputi :
 - a. evaluasi bidang pemerintahan kelurahan;
 - b. evaluasi bidang kewilayahan kelurahan; dan
 - c. evaluasi bidang kemasyarakatan kelurahan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator penilaian perlombaan kinerja kelurahan.

Bagian Kedua
Evaluasi Bidang

Pasal 10

- (1) Evaluasi bidang pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi aspek :
 - a. Pemerintahan;
 - b. kinerja;
 - c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. Kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Government*; dan
 - e. pelestarian adat dan budaya.
- (2) Evaluasi bidang kewilayahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi aspek :
 - a. identitas;
 - b. batas;
 - c. inovasi;
 - d. tanggap dan siaga bencana; dan
 - e. pengaturan investasi.
- (3) Evaluasi bidang kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi aspek :
 - a. partisipasi masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. keamanan dan ketertiban;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. ekonomi;

h. penanggulangan...

- h. penanggulangan kemiskinan; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN PENILAIAN PERLOMBAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan Tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh Tim Penilai tingkat Kabupaten.
- (2) Peserta Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan adalah seluruh Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

BAB V VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan verifikasi dan penilaian dilakukan untuk meningkatkan akurasi penilaian perlombaan kinerja kelurahan.
- (2) Verifikasi dan penilaian dilakukan oleh Tim penilai tingkat Kabupaten, meliputi :
 - a. kunjungan ke lokasi kelurahan ;
 - b. penilaian atas presentasi Lurah tentang kondisi bidang pemerintahan , bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan sesuai indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - c. pengujian terhadap indikator penunjang yang dipandang perlu oleh Tim Penilai untuk mendukung obyektifitas penilaian; dan
 - d. penentuan peringkat berdasarkan hasil penilaian.

BAB VI EVALUASI OLEH TIM PENILAI TINGKAT KABUPATEN

Pasal 13

- (1) Tim Penilai Kinerja Kelurahan tingkat Kabupaten mengevaluasi perkembangan kelurahan berdasarkan hasil nilai indikator penilaian
- (2) Laporan evaluasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan kelurahan meliputi:
 - a. Kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Kelurahan Berkembang; dan
 - c. Kelurahan Kurang Berkembang.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori sebagai berikut:
- a. nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang; dan
 - c. nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang

BAB VII PENETAPAN PERINGKAT

Pasal 14

- (1) Hasil Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan dalam bentuk pemeringkatan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan yang di susun oleh Tim.
- (2) Kelurahan yang meraih peringkat I dan dengan Kategori Cepat Berkembang mewakili Kabupaten Sukabumi dalam Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penentuan peringkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Penghargaan diberikan untuk peringkat I, II, dan III Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan Tingkat Kabupaten dalam bentuk piala, piagam penghargaan dan hadiah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Upacara Hari Otonomi Daerah Tingkat Kabupaten Sukabumi, atau kesempatan lain sesuai agenda pemerintah daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan Tingkat Kabupaten dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Tim penilai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan Tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Perlombaan Kinerja Kelurahan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 22 November 2021



BUPATI SUKABUMI

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI



ADIP SUKAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 117

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 117 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2021
TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PERLOMBAAN KINERJA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

INSTRUMEN PENGUNGKAP DATA DAN NILAI PERKEMBANGAN KELURAHAN

Petunjuk:

1. Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Kelurahan ini merupakan instrumen yang cukup objektif untuk melihat dan menilai Perkembangan Kelurahan.
2. Isilah Instrumen Evaluasi ini dengan kejujuran karena akan berdampak pada keabsahan tingkat perkembangan Kelurahan. Dengan demikian maka pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Kelurahan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Bagi Kelurahan itu sendiri dapat mengevaluasi diri dan melakukan upaya segera untuk meningkatkan perkembangan Kelurahannya masing-masing.
3. Lingkarilah poin/angka (Kolom 4 dan Kolom 5) yang besumber dari Bidang, Aspek, Indikator, dan Subindikator secara benar dan tepat pada kondisi dua tahun terakhir.
4. Kondisi/jumlah tahun ke-I (kolom 4) dan tahun ke-II (kolom 5) harus diisi lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi lengkap maka data cukup sulit diolah. Sebagai konsekuensinya, Kelurahan yang bersangkutan cukup sulit diketahui tingkat perkembangannya.
5. Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang komprehensif dan terdokumentasikan serta informan yang andal.

INDIKATOR PENILAIAN LOMBA KINERJA KELURAHAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POINT		KETERANGAN
			TAHUN KE 1	TAHUN KE 2	
1	2	3	4	5	6
1.	SARANA PRASARANA	1. Gedung Kantor			
		ADA, DI RUMAH PRIBADI	1	1	
		ADA, SEWA	2	2	
		ADA, MILIK PEMDA, SEMI PERMANEN	3	3	
		ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN	4	4	
		2. Gedung Pertemuan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA, MILIK PEMDA, SEMI PERMANEN	2	2	
		ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN	3	3	
		3. Perangkat Kelurahan			
		50% BUKAN PNS	1	1	
		DI ATAS 50% PNS	2	2	
		4. Mesin tik/ komputer			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
		5. Kendaraan dinas lurah			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		6. Struktur Organisasi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		7. Jaringan Listrik			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		8. Sumber Daya Listrik (PLN)			
		TIDAK STABIL	1	1	
		STABIL	2	2	
		9. Sumber Daya Listrik (NON-PLN)			
		TIDAK STABIL	1	1	
		STABIL	2	2	
		10. Perpustakaan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
2.	AKUNTABILITAS	1. Kotak Pengaduan Masyarakat			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA TAPI TIDAK DIMANFAATKAN	2	3	
		ADA DAN DIMANFAATKAN	3	3	
3.	ADMINISTRASI	1. Laporan Kinerja Tahunan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Laporan Tahunan Lurah			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Papan Informasi Pelayanan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4. Loket Pelayanan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		5. Buku Registrasi Pelayanan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
		6. Buku Profil Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	4	4	
		7. Buku Administrasi Umum			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		8. Buku Administrasi Kependudukan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		9. Buku Administrasi Keuangan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		10. Buku Administrasi Pembangunan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		11. Buku Administrasi Lainnya			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		12. Kartu Uraian Tugas			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
		13. Peta Wilayah Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		14. Peta Batas Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
I	KINERJA				
1.	Kinerja	1. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat			
		- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhir			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Fasilitasi dalam pemasaran produk unggulan dari masyarakat			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat			Lampirkan dokumennya
		- Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
		3. Pembinaan Kemasyarakatan			
		- Melakukan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong 2 tahun terakhir			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- <i>Reward</i> bagi perangkat dan kelompok masyarakat			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4. Budaya Kerja			
		- apakah telah mendata kehadiran pegawai secara rutin			
		TIDAK ADA	1	1	
		YA	2	2	
		- apakah telah memiliki standar jam pelayanan			
		TIDAK ADA	1	1	
		YA	2	2	
		- apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat			
		BELUM ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
III	INISIATIF DAN KREATIVITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1.	Inisiatif dan kreativitas	1. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat			Lampirkan dokumennya
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparatur			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
IV	KELURAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/ E -GOVERNMENT				
1.	Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet	1. Jaringan Internet			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Website Desa			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
2.	Perangkat Komputer	1. Software dengan Spesifikasi Minimal untuk Operasi Jaringan Internet			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Hardware dengan Spesifikasi Minimal untuk Operasi Jaringan Internet			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
3.	Administrasi	1. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi			
		- Administrasi Umum			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Administrasi Kependudukan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Administrasi Keuangan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Administrasi Pembangunan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
		- Administrasi Lainnya			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur di tingkat RT/RW			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4. Perpustakaan Online			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		5. Internet Gratis/Hotspot			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
V	PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA				
1.	Pelestarian Adat dan Budaya	1. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Budaya			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Keterlibatan Kelembagaan Adat dalam Pelestarian Adat dan Budaya			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Pembinaan Seni Budaya Setempat			Oleh Siapa, sebutkan
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4. Kebijakan Menjaga kelestarian adat			Oleh Siapa, sebutkan
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		5. Alokasi Anggaran Pelestarian Adat			Oleh Siapa, sebutkan
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

B. BIDANG KEWILAYAHAN

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POINT		KETERANGAN
			TAHUN KE 1	TAHUN KE 2	
1	2	3	4	5	6
III	INOVASI				
1.	Embrio Inovasi	Aktivitas			
		1. Adanya produk unggulan.			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Adanya Peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan.			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Adanya keuntungan finansial untuk dari aktivitas ekonomi produktif.			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4. Adanya keuntungan sosial dari aktivitas ekonomi produktif.			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		5. Adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
2.	Kelembagaan Inovasi	1. Adanya pelembagaan aktivitas inovasi masyarakat (mis. UMKM, koperasi, cluster).			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Adanya peta rencana (roadmap inovasi) secara berkelanjutan dalam mengembangkan produk unggulan desa/kel			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
3.	Jejaring Inovasi	1. Interkoneksi yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi masyarakat (misal. adanya divisi kerjasama dalam manajemen UMKM/BUMDes).			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintahan sekitar dalam pengelolaan potensi khususnya produk unggulan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Dukungan pemerintahan supra (mis. kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4. Jaringan pengembangan (mis. dukungan dunia pendidikan dan keterampilan) untuk peningkatan kualitas produk unggulan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
		5. Jejaring Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk inovasi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
4.	Budaya Inovasi Masyarakat	1. Teknologi tepat guna yang ditemukan masyarakat 2 tahun terakhir.			Lampirkan semua bukti
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Pemanfaatan teknologi tepat guna.			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Lembaga penyedia teknologi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4. Aktivitas masyarakat dalam pengembangan produk			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		5. Upaya pelestarian pengembangan produk			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
5.	Keterpaduan Perencanaan Inovasi	1. Adanya integrasi antara peta rencana (<i>roadmap</i>) inovasi dengan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan (Mis. Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah)			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Adanya sinergi pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa)			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
6.	Kepekaan Masyarakat terhadap Dinamika Global/Ekonomi	1. Penemuan inovasi yang ramah lingkungan			Lampirkan semua bukti
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Kemampuan penyesuaian produk inovasi terhadap dinamika tuntutan konsumen/pasar			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Adanya rencana pengembangan produk inovasi di dalam maupun di luar Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4. Adanya sinergi berbagai lembaga dalam pembangunan inovatif (<i>Heksagonal</i>)			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
7.	Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan Potensi secara Inovatif	1. Spesialisasi Produk Unggulan			Sebutkan produk unggulannya dan lembaga/unsur yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Dukungan Penelitian dan Pengembangan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun dari Supranya			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4. Ketersediaan dan Akses Bahan Baku dari dalam Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		5. Ketersediaan Sumberdaya Modal dari pemerintah Kelurahan atau pihak ke tiga			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		6. Pelatihan Kewirausahaan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
		7. Adanya Kepemimpinan dan Visi Bersama dalam mengembangkan dan mengelola potensi Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
IV	TANGGAP DAN SIAGA BENCANA				
1.	Perencanaan Kontingensi	1. Adanya musyawarah perencanaan identifikasi bencana.			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
2.	Peta Risiko bencana	1. Ketersediaan peta bencana beserta rambu-rambunya			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Sosialisasi mengenai peta bencana pada masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir ini			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
3.	Sistem Peringatan Dini Terpusat Pada Masyarakat	1. Pengetahuan dan simulasi dalam menghadapi Risiko 2 tahun terakhir			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Sistem Pemantauan yang dikembangkan pemerintah Kelurahan dalam menghadapi bencana			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
		3. Layanan TIM penanganan bencana yang di bentuk Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4. Penyebarluasan dan Komunikasi tanggap bencana			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		5. Alat deteksi dini bencana			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
4.	Infrastruktur Evakuasi	1. Tempat Evakuasi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Jalur Evakuasi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Sarana Evakuasi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
V	PENGATURAN INVESTASI				
1.	Investasi yang masuk ke Kelurahan	1. Investasi yang masuk ke Kelurahan dalam 2 tahun terakhir			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Apakah melibatkan LPM dan Pemerintah Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Menyebabkan terjadinya pembebanan pada Kelurahan			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
		4. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	

C. BIDANG KEMASYARAKATAN

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POINT		KETERANGAN
			TAHUN KE 1	TAHUN KE 2	
1	2	3	4	5	6
I	PARTISIPASI MASYARAKAT				
1.	Musyawahar Dusun	1. Partisipasi Masyarakat			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Rasio Laki-Laki dan Perempuan			
		TIDAK SEIMBANG	3	3	
		SEIMBANG	1	1	
2.	Swadaya Masyarakat untuk Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan 2 Tahun Terakhir	1. Partisipasi Pendanaan Masyarakat			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
3.	Swakelola Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan 2 Tahun Terakhir	1. Partisipasi Pengelolaan Pembangunan oleh Masyarakat			
		TIDAK ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN	1	1	
		ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN	2	2	

1	2	3	4	5	6
4.	Gotong Royong Penduduk Desa/kel 2 Tahun Terakhir	1. Aktifitas GotongRoyong Penduduk			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	4	4	
II LEMBAGA KEMASYARAKATAN					
1.	Organisasi Pemuda	1. Aktifitas Organisasi Pemuda			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
2.	Organisasi Profesi (petani, pedagang, nelayan, buruh, paguyuban, dll)	1. Aktifitas Organisasi Profesi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
3.	Organisasi Olah Raga	1. Aktifitas Organisasi Olah Raga			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
4.	LPM atau Sebutan Lain	1. Aktifitas LPM			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
5.	Kelompok Gotong Royong	1. Aktifitas Kelompok Gotong Royong			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
6.	Karang Taruna	1. Aktifitas Karang Taruna			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
7.	Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian	1. Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
8.	Kelompok Usaha	1. Aktifitas Kelompok Usaha			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
9.	Koperasi	1. Memiliki Koperasi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	4	4	
10.	Organisasi Perempuan	1. Aktivitas Organisasi Perempuan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
III	PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)				
1.	Lembaga PKK	1. Keberadaan PKK			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	4	4	

1	2	3	4	5	6
2.	Program PKK	1. Realisasi 10 Program Pokok			
		TEREALISASI 1 KEGIATAN	1	1	
		TEREALISASI di atas 1 KEGIATAN	2	2	
3.	Organisasi PKK	1. Kelengkapan Kelompok Kerja			
		TIDAK LENGKAP	1	1	
		LENGKAP	2	2	
		2. Kelengkapan Kelompok Dasa Wisma			
		TIDAK LENGKAP	1	1	
		LENGKAP	2	2	
IV	KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
1.	Pengamanan Lingkungan dan Manusia	1. Kerja sama pelestarian lingkungan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Kerja sama pemantauan limbah perusahaan yang ada di Kelurahan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Kerja sama pendaaur ulangan limbah			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
		4. Petugas keamanan lingkungan (Linmas)			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		5. Pos kamling (Keamanan Lingkungan)			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
2.	Konflik SARA	1. Konflik antar kelompok			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
		2. Konflik antar suku			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
		3. Konflik berbau agama/kepercayaan			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
		4. Konflik antar RAS			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
3.	Perkelahian	1. Kasus perkelahian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	

1	2	3	4	5	6
4.	Pencurian dan Perampokan	1. Kasus pencurian/perampokan biasa			
		TIDAK ADA	2	2	
		ADA	1	1	
		2. Kasus pencurian/perampokan dengan kekerasan			
		TIDAK ADA	2	2	
		ADA	1	1	
5.	Perjudian	1. Jumlah kasus perjudian dengan berbagai modus			
		TIDAK ADA	2	2	
		ADA	1	1	
6.	Narkoba	1. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku pemerintah Kelurahan			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
		2. Anggota Masyarakat yang Terkena Narkoba			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
7.	Prostitusi	1. Jumlah kasus prostitusi dengan berbagai modus			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
8.	Pembunuhan	1. Jumlah kasus pembunuhan			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	

1	2	3	4	5	6
		2. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk kelurahan setempat			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
		3. Jumlah kasus pembunuhan yang pelakunya penduduk kelurahan setempat			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
9.	Kekerasan Seksual	1. Jumlah kasus perkosaan			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
10.	Kekerasan dalam keluarga	1. Kekerasan terhadap anak			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
		2. Kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
11.	Penculikan	1. Jumlah Kasus Penculikan			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
12.	HIV/AIDS	1. Jumlah Kasus HIV/AIDS			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	

1	2	3	4	5	6
V	PENDIDIKAN				
1.	Buta Huruf	1. Penduduk yang tidak bisa baca tulis			
		TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
2.	Putus Sekolah	1. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat			
		KURANG DARI 1%	4	4	
		LEBIH DARI 1%	1	1	
		2. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/ sederajat			
		KURANG DARI 1%	4	4	
		LEBIH DARI 1%	1	1	
3.	Tamat Sekolah	1. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTA/ sederajat			
		KURANG DARI 1%	4	4	
		LEBIH DARI 1%	1	1	
4.	Tamat Sekolah	1. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTA/ sederajat			
		KURANG DARI 1%	1	1	
		LEBIH DARI 1%	4	4	
		2. Jumlah Penduduk Tidak Tamat D3/ Sarjana Muda			
		KURANG DARI 1%	1	1	
		LEBIH DARI 1%	4	4	

1	2	3	4	5	6
		3. Jumlah Penduduk Tidak Tamat Sarjana/S-1			
		KURANG DARI 1%	1	1	
		LEBIH DARI 1%	4	4	
		4. Jumlah Penduduk Tidak Tamat Pasca Sarjana			
		KURANG DARI 1%	1	1	
		LEBIH DARI 1%	4	4	
VI	KESEHATAN				
1.	Kematian Bayi	1. Jumlah Kematian Bayi			
		PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1	1	
		PENURUNAN DI ATAS 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	4	4	
2.	Gizi dan Kematian Balita	1. Jumlah Balita Gizi Buruk			
		PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1	1	
		PENURUNAN LEBIH DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	2	2	
		2. Jumlah Balita Meninggal			
		KURANG DARI 1%	2	2	
		DI ATAS 1%	1	1	
3.	Posyandu	1. Keberadaan Posyandu			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	4	4	

1	2	3	4	5	6
		2. Kelembagaan			
		PRATAMA	1	1	
		DIATAS PRATAMA	4	4	
4.	Sumber Air Bersih	1. Jumlah RT Pengguna Sumber Air Lainnya			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
5.	Kepemilikan Jamban Dalam Rumah Tangga (RT)	1. Total RT Mempunyai Jamban/WC sendiri			
		MENURUN	1	1	
		TETAP	2	2	
		MENINGKAT	3	3	
		2. Total RT Mempunyai Tidak Memiliki Jamban/WC sendiri			
		MENURUN	3	3	
		TETAP	2	2	
		MENINGKAT	1	1	
		3. Total RT Pengguna MCK Umum			
		MENURUN	1	1	
		TETAP	2	2	
		MENINGKAT	3	3	

1	2	3	4	5	6
		4. Total RT pengguna MCK di sungai/kali			
		MENURUN	3	3	
		TETAP	2	2	
		MENINGKAT	1	1	
		5. Total RT yang tidak mendapat air bersih			
		MENURUN	3	3	
		TETAP	2	2	
		MENINGKAT	1	1	
6.	Fasilitas Kesehatan Lingkungan	1. Puskesmas/Balai Pengobatan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Bidan/Mantri/Dokter			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Jamban Keluarga/MCK			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

1	2	3	4	5	6
VII.	EKONOMI				
1.	Pengangguran	1. Jumlah penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja			
		KURANG DARI 10%	4	4	
		LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10%	1	1	
2.	Kelembagaan Ekonomi	1. Pasar Tradisional			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Toko/Kios			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		3. Pangkalan Ojek, Becak, Delman, dan Sejenisnya			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
VIII	PENANGGULANGAN KEMISKINAN				
1.	Data Masyarakat Miskin	1. Data Masyarakat Miskin			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
2.	Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Program Penanggulangan Kemiskinan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	3	3	

1	2	3	4	5	6
IX	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT				
1.	Analisis Kebutuhan	1. Penyusunan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2. Banyaknya Kegiatan Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat			
		1 -3 KEGIATAN	1	1	
		LEBIH DARI 3 KEGIATAN	2	2	
2.	Pelaksanaan Program	1. Jumlah Jenis program Peningkatan Kapasitas Masyarakat			
		1 -3 KEGIATAN	1	1	
		LEBIH DARI 3 KEGIATAN	2	2	

CARA PENENTUAN TINGKAT PERKEMBANGAN KELURAHAN

Menghitung poin total dari subindikator masing-masing Kelurahan kemudian rujuk pada nilai ideal yang ditentukan pada kolom 3 kategori di bawah. Mengklasifikasikan poin Kelurahan ke dalam kategori sebagai berikut :

NO	POIN	KATEGORI
1	2	3
1	≤ 200	Kurang Berkembang
2	201 – 350	Berkembang
3	≥ 351	Cepat Berkembang



BUPATI SUKABUMI

MARWAN HAMAMI